

2017



Badan Nasional
Sertifikasi Profesi

SKEMA SERTIFIKASI KKNi LEVEL II PADA KOMPETENSI KEAHLIAN MULTIMEDIA

Skema sertifikasi KKNi Level II pada Kompetensi Keahlian Multimedia merupakan skema sertifikasi KKNi yang dikembangkan oleh komite skema sertifikasi BNSP bersama Direktorat Pembinaan SMK. Skema mengacu pada SKKNI Nomor 115 Tahun 2007 Tentang Penetapan SKKNI Sektor Komunikasi Sub sektor Pos dan Telekomunikasi Bidang jaringan Telekomunikasi Sub Bidang Jasa Multimedia dan SKKNI Nomor 400 Tahun 2014 Tentang Penetapan SKKNI Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara, dan Penerbitan Musik Bidang Pembuatan Animasi. Skema sertifikasi ini digunakan untuk memastikan kompetensi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan dan sebagai acuan bagi LSP SMK dan asesor kompetensi dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi Keahlian Multimedia.



Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan
R.I



SKEMA SERTIFIKASI KKNi LEVEL II PADA KOMPETENSI KEAHLIAN MULTIMEDIA

Disahkan pada tanggal 6 November 2017

Oleh :



Hamid Muhammad

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar
dan Menengah



Sumarna F. Abdurrahman

Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi
(BNSP)

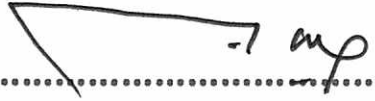




2017



**SKEMA SERTIFIKASI KKNI LEVEL II PADA KOMPETENSI
KEAHLIAN MULTIMEDIA**



Skema sertifikasi ini telah diverifikasi oleh :

- 1. Asrizal Tatang : 
- 2. Inda Mapiliandari : 
- 3. Muhammad Najib : 
- 4. Mulyanto : 
- 5. Hendra Pribadi : 

1. LATAR BELAKANG

Pemberlakuan era persaingan bebas dalam regional Asia Tenggara yang dikenal dengan sebutan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah diberlakukan. Perhimpunan masyarakat bangsa Asia Tenggara dalam organisasi *Association of South East Asian Nation* (ASEAN) sepakat untuk memperkuat kawasan dengan membuka akses perekonomian lewat pasar bebas yang dimulai sejak tahun 2016 ini. Beberapa sektor sudah disepakati terbuka untuk menuju integrasi ekonomi Visi ASEAN 2020. Masyarakat Ekonomi ASEAN tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga untuk tenaga Multimedia dan lainnya. Oleh karena itu, MEA secara langsung akan menuntut kualitas tenaga kerja di Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XVI pasal 61 ayat 3 menyatakan bahwa sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

Tuntutan kebutuhan industri di bidang Multimedia menghendaki tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang terstandarisasi dan profesional. Tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang baik bersumber dari proses pendidikan yang baik, maka untuk membangun, memelihara, dan memastikan kompetensi bagi peserta didik program keahlian Multimedia perlu diselenggarakannya sertifikasi kompetensi oleh LSP SMK yang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 4678/D/KEP/MK/2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.

Dengan skema sertifikasi yang mengacu langsung pada SKKNI ini diharapkan dapat memberi manfaat langsung para pemangku kepentingan.

1.1. Bagi Industri

- 1.1.1. Membantu industri meyakinkan kepada kliennya bahwa jasanya telah dibuat oleh tenaga-tenaga yang kompeten.
- 1.1.2. Membantu industri dalam rekrutmen dan mengembangkan tenaga berbasis kompetensi guna meningkatkan efisiensi pengembangan SDM khususnya dan efisiensi nasional pada umumnya.
- 1.1.3. Membantu industri dalam sistem pengembangan karir dan remunerasi tenaga berbasis kompetensi dan meningkatkan produktivitas.

1.2. Bagi Tenaga Kerja

- 1.2.1. Membantu tenaga profesi meyakinkan kepada organisasi/industri/kliennya bahwa dirinya kompeten dalam bekerja atau menghasilkan jasa dan meningkatkan percaya diri tenaga profesi
- 1.2.2. Membantu tenaga profesi dalam merencanakan karirnya dan mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal maupun secara mandiri.
- 1.2.3. Membantu tenaga profesi dalam memenuhi persyaratan regulasi.
- 1.2.4. Membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara.
- 1.2.5. Membantu tenaga profesi dalam promosi profesinya dipasar tenaga kerja

1.3. Bagi Lembaga Pendidikan dan juga Pelatihan.

- 1.3.1. Membantu memastikan *link and match* antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kompetensi dunia industri.
- 1.3.2. Membantu memastikan tercapainya efisiensi dalam pengembangan program diklat.
- 1.3.3. Membantu memastikan pencapaian hasil diklat yang tinggi.
- 1.3.4. Membantu Lembaga diklat dalam sistem asesmen yang dapat memastikan dan memelihara kompetensi peserta diklat.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1 Ruang Lingkup : Multimedia
- 2.2 Lingkup penggunaan sertifikat: pada perusahaan, instansi, lembaga, atau organisasi yang memiliki divisi atau berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan kompetensi kerja KKNi Level II Multimedia
- 3.2. Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh LSP SMK atau asesor lainnya.

4. ACUAN NORMATIF

Acuan-acuan yang digunakan dalam menyusun skema sertifikasi ini meliputi:

- 4.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

- 4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
- 4.5. Instruksi Presiden nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.
- 4.6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional.
- 4.7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 3 tahun 2016 tentang Tatacara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
- 4.8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 115 tahun 2007 Tentang Penetapan SKKNI Sektor Komunikasi Sub sektor Pos dan Telekomunikasi Bidang jaringan Telekomunikasi Sub Bidang Jasa Multimedia
- 4.9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 400 Tahun 2014 Tentang Penetapan SKKNI Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara, dan Penerbitan Musik Bidang Pembuatan Animasi
- 4.10. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah No.130/D/KEP/KR/2017 tentang Struktur Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan
- 4.11. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/III/2014 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi
- 4.12. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 2/BNSP/VIII/2017 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi
- 4.13. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/II/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Profesi bagi Lulusan SMK

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1. Deskripsi

Jenis kemasan ini adalah kemasan KKNi yang merupakan KKNi kompetensi teknis lulusan SMK. KKNi ini merefleksikan peran individu dalam melaksanakan satu tugas spesifik, dengan menggunakan alat, dan informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, di bawah pengawasan langsung atasannya. Memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik, sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah

yang lazim timbul. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.

5.2. Sikap Kerja

Secara umum sikap kerja yang diharapkan :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

5.3. Peran Kerja

KKNI ini merupakan jalur untuk bekerja pada kompetensi keahlian Multimedia, dalam melaksanakan pekerjaan, bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.

5.4. Kemungkinan Jabatan

Kemungkinan jabatan yang dapat diemban oleh pemegang sertifikat ini adalah -

5.5. Aturan Pengemasan.

Didalam pemaketan yang ditetapkan untuk level II Kompetensi Keahlian Multimedia adalah sebagai berikut :

- 5.5.1. Jenis Kemasan : KKNI
- 5.5.2. Nama Skema : KKNI Level II pada Kompetensi Keahlian Multimedia
- 5.5.3. Aturan Pengemasan :

Untuk mendapatkan KKNI Level II pada Kompetensi Keahlian Multimedia, kompetensi yang harus dicapai dengan total 15 (lima belas) unit kompetensi yang terdiri dari:

- a. 4 (empat) Unit Kompetensi Inti
- b. 11 (sebelas) Unit Kompetensi Fungsional

5.6. Rincian Unit Kompetensi

Rincian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
KOMPETENSI UMUM DAN INTI		
1	TIK.MM01.004.01	Memperagakan pengetahuan dan syarat – syarat multimedia
2	TIK.MM01.005.01	Mengidentifikasi komponen multimedia
3	TIK.MM01.007.01	Memilih dan memakai <i>software</i> dan <i>hardware</i> untuk multimedia
4	TIK.MM01.012.01	Mengikuti prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja
KOMPETENSI FUNGSIONAL		
5	TIK.MM02.032.01	Membuat, memanipulasi, dan menggabung gambar 2D
6	TIK.MM02.049.01	Menyiapkan dan membuat frame/cel berwarna
7	TIK.MM02.052.01	Membuat rekaman gambar berurutan untuk animasi
8	TIK.MM02.053.01	Membuat dan memanipulasi gambar-gambar digital
9	TIK.MM02.062.01	Menyiapkan bahan dan dokumen untuk editing
10	TIK.MM02.064.01	Menjalankan system editing non-linear
11	TIK.MM02.070.01	Menggabungkan gambar 2D kedalam sajian multimedia
12	TIK.MM02.071.01	Menggabungkan fotografi digital kedalam sajian multimedia
13	TIK.MM02.072.01	Menggabungkan audio kedalam sajian multimedia
14	TIK.MM02.074.01	Menggabungkan Video ke dalam sajian multimedia
15	J.591120.006.01	Melakukan penyuntingan suara dan gambar bercerita (animatic previsualisation)

5.7. PENCAPAIAN KOMPETENSI

Skema KKNI Level II pada kompetensi keahlian Multimedia dapat dicapai melalui pendekatan klaster dan harus dicapai dalam 3 (tiga) tahun. Klaster yang digunakan adalah sebagai berikut:

5.7.1. Desain Grafis

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
KOMPETENSI UMUM DAN INTI		
1	TIK.MM01.007.01	Memilih dan memakai <i>software</i> dan <i>hardware</i> untuk multimedia
2	TIK.MM01.012.01	Mengikuti prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja
KOMPETENSI FUNGSIONAL		
3	TIK.MM02.032.01	Membuat, memanipulasi, dan menggabung gambar 2D
4	TIK.MM02.053.01	Membuat dan memanipulasi gambar-gambar digital

5.7.2. Desain Grafis Percetakan

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
KOMPETENSI UMUM DAN INTI		
1	TIK.MM01.004.01	Memperagakan pengetahuan dan syarat – syarat multimedia
2	TIK.MM01.005.01	Mengidentifikasi komponen multimedia
3	TIK.MM01.007.01	Memilih dan memakai <i>software</i> dan <i>hardware</i> untuk multimedia
KOMPETENSI FUNGSIONAL		
4	TIK.MM02.032.01	Membuat, memanipulasi, dan menggabung gambar 2D
5	TIK.MM02.049.01	Menyiapkan dan membuat frame/cel berwarna
6	TIK.MM02.053.01	Membuat dan memanipulasi gambar-gambar digital
7	TIK.MM02.070.01	Menggabungkan gambar 2D kedalam sajian multimedia
8	TIK.MM02.071.01	Menggabungkan fotografi digital kedalam sajian multimedia

5.7.3. Animasi 2D

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
KOMPETENSI UMUM DAN INTI		
1	TIK.MM01.004.01	Memperagakan pengetahuan dan syarat – syarat multimedia
2	TIK.MM01.005.01	Mengidentifikasi komponen multimedia
3	TIK.MM01.007.01	Memilih dan memakai <i>software</i> dan <i>hardware</i> untuk multimedia
KOMPETENSI FUNGSIONAL		
4	TIK.MM02.032.01	Membuat, memanipulasi, dan menggabung gambar 2D
5	TIK.MM02.052.01	Membuat rekaman gambar berurutan untuk animasi
6	TIK.MM02.064.01	Menjalankan system editing non-linear
7	J.591120.006.01	Melakukan penyuntingan suara dan gambar bercerita (animatic previsualisation)

5.7.4. Pengolahan Audio Video

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
KOMPETENSI UMUM DAN INTI		
1	TIK.MM01.004.01	Memperagakan pengetahuan dan syarat – syarat multimedia
2	TIK.MM01.005.01	Mengidentifikasi komponen multimedia
3	TIK.MM01.007.01	Memilih dan memakai <i>software</i> dan <i>hardware</i> untuk multimedia
KOMPETENSI FUNGSIONAL		
4	TIK.MM02.062.01	Menyiapkan bahan dan dokumen untuk editing
5	TIK.MM02.064.01	Menjalankan system editing non-linear
6	TIK.MM02.072.01	Menggabungkan audio kedalam sajian multimedia
7	TIK.MM02.074.01	Menggabungkan Video ke dalam sajian multimedia

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

- 6.1. Peserta didik pada SMK kompetensi keahlian Multimedia yang telah menyelesaikan seluruh mata pelajaran
- 6.2. Telah memiliki sertifikat atau surat keterangan telah melaksanakan Praktek Kerja Industri
- 6.3. Memiliki nilai rapot pada kompetensi terkait.

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi
- 7.1.3. Memperoleh pemberitahuan tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat nasional.
- 7.1.4. Memperoleh jaminan kerahasiaan terhadap proses sertifikasi
- 7.1.5. Memperoleh hak banding terhadap keputusan Sertifikasi
- 7.1.6. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten
- 7.1.7. Menggunakan sertifikat yang diperoleh untuk promosi diri sebagai tenaga pada bidang multimedia

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Melaksanakan keprofesian di kompetensi Keahlian Multimedia.
- 7.2.2. Menjaga dan mentaati kode etik profesi secara sungguh-sungguh dan konsekuen.

- 7.2.3. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.4. Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.5. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

8. BIAYA SERTIFIKASI

- 8.1. Biaya sertifikasi dapat bersumber dari pemerintah, partisipasi masyarakat atau sumber dana lainnya.
- 8.2. Biaya uji terdiri dari biaya pendaftaran peserta, penerbitan sertifikat, honor asesor, penggandaan materi, biaya akomodasi dan transpor asesor yang diperhitungkan sesuai kondisi dan rencana pelaksanaan asesmen.

9. PERSYARATAN PROSES SERTIFIKASI

9.1 Proses Pendaftaran

- 9.1.1 Pemohon memahami proses Asesmen (Skema Sertifikasi Multimedia) ini yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat
- 9.1.2 Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
 - a. Kopi Kartu Pelajar
 - b. Bukti dari persyaratan klausul 6
 - c. Pas foto terbaru 4x6 sebanyak 2 lembar
- 9.1.3 Peserta mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung.
- 9.1.4 Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.5 LSP SMK menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

9.2 Proses Asesmen

- 9.2.1 Asesmen skema sertifikasi KKNII level II Kompetensi Keahlian Multimedia direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan

skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.

- 9.2.2 Pelaksanaan Asesmen untuk skema sertifikasi KJNI level II Kompetensi Keahlian Multimedia dapat dilakukan sekaligus atau dengan cara dicicil per kluster sertifikasi.
- 9.2.3 LSP SMK memilih dan menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
- 9.2.4 Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.5 Asesor menjelaskan, membahas dan menepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
- 9.2.6 Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.7 Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut uji kompetensi.

9.3 Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1 Uji kompetensi skema sertifikasi KJNI level II Kompetensi Keahlian Multimedia dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metoda praktik, tertulis, lisan yang andal dan obyektif serta konsisten. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidaklulusan.
- 9.3.2 Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi LSP SMK.
- 9.3.3 Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian skema sertifikasi KJNI level II Kompetensi Keahlian Multimedia diverifikasi dan dikalibrasi.
- 9.3.4 Proses Uji kompetensi dapat dilakukan sekaligus atau dengan cara dicicil per kluster sertifikasi.
- 9.3.5 Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.

- 9.3.6 Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten".
- 9.3.7 Asesor melaporkan dan menyampaikan rekomendasi hasil uji kompetensi kepada LSP SMK.

9.4 Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1 LSP SMK menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
- mengambil keputusan sertifikasi;
 - melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2 Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh LSP SMK berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi. Personil pelaksanaan uji kompetensi tidak ikut serta dalam membuat keputusan sertifikasi.
- 9.4.3 Personil LSP SMK yang membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.
- 9.4.4 LSP SMK melakukan rapat teknis untuk memverifikasi berkas sertifikasi dan menetapkan status kompetensi yang dibuat dalam berita acara, untuk proses penerbitan sertifikat kompetensi.
- 9.4.5 LSP SMK menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP SMK dengan masa berlaku sertifikat 3 (tiga) tahun.
- 9.4.6 Sertifikat KKNII level II diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5 Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 9.5.1 LSP SMK akan melakukan pembekuan apabila:
- pemegang sertifikat menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan.
 - pemegang sertifikat mencemarkan nama baik LSP SMK.
- 9.5.2 LSP SMK akan melakukan pencabutan sertifikat apabila terjadi penyalahgunaan sertifikat dan pelanggaran telah diberikan peringatan tetapi tidak diindahkan

9.6 Pemeliharaan Sertifikat

LSP SMK tidak melakukan Pemeliharaan terhadap Sertifikat Kompetensi.

9.7 Proses Sertifikasi Ulang

LSP SMK tidak melakukan Proses Sertifikasi Ulang.

9.8 Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat KKNII Level II Kompetensi Keahlian Multimedia harus menandatangani persetujuan untuk :

9.8.1 Memenuhi ketentuan skema sertifikasi.

9.8.2 Sertifikat hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.

9.8.3 Tidak menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan LSP SMK.

9.8.4 LSP SMK akan menghentikan semua kewenangan pemegang sertifikat yang berhubungan dengan sertifikat yang telah diterbitkan.

9.8.5 Penyalahgunaan sertifikat kompetensi akan diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

9.9 Banding

9.9.1 LSP SMK menetapkan prosedur untuk menerima, melakukan kajian, dan membuat keputusan terhadap banding.

9.9.2 LSP SMK menetapkan prosedur yang menjamin bahwa semua banding ditangani secara konstruktif, tidak berpihak dan tepat waktu.

9.9.3 Penjelasan mengenai proses penanganan banding dapat diketahui publik tanpa diminta.

9.9.4 LSP SMK memberitahukan secara resmi kepada pemohon banding pada akhir proses penanganan banding.